

PENGARUH KUALITAS KELEMBAGAAN ANTI KORUPSI TERHADAP AKUNTABILITAS SEKTOR PUBLIK DAN KEPERCAYAAN INVESTOR DI INDONESIA

Ahmad Rizali Hadi¹, Muhammad Wandy Rizal², Rulan Ruhut Marune Pasaribu³,
Silvia Margaretha Nainggolan⁴, Srida Fernanda Servia⁵, Tiarma Sitorus⁶
ahmad.rizali.hadi88@gmail.com¹, mugiwara051007@gmail.com², gulanpasaribu@gmail.com³,
silvianainggolan4@gmail.com⁴, sridafernanda@gmail.com⁵, tiarmasitorus942@gmail.com⁶
Universitas Palangka Raya

ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu hambatan struktural yang secara konsisten melemahkan tata kelola pemerintahan di Indonesia dan berimplikasi luas terhadap stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, serta daya tarik investasi. Lemahnya kualitas kelembagaan anti korupsi, baik dalam aspek regulasi, pengawasan, maupun penegakan hukum, sering kali menjadi penyebab rendahnya akuntabilitas sektor publik dan berkurangnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia. Sebaliknya, keberadaan kelembagaan anti korupsi yang efektif, transparan, dan independen diyakini mampu memperkuat sistem akuntabilitas, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta menciptakan kepastian hukum yang diperlukan bagi keberlanjutan investasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas kelembagaan anti korupsi terhadap akuntabilitas sektor publik dan implikasinya pada kepercayaan investor di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif melalui analisis data sekunder dari laporan Corruption Perceptions Index (CPI) yang diterbitkan Transparency International, indikator tata kelola pemerintahan (Worldwide Governance Indicators / WGI) dari World Bank, serta laporan realisasi investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kelembagaan anti korupsi tercermin pada perbaikan skor CPI Indonesia, yang dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran 34–37 dari skala 100, sekaligus memperlihatkan hubungan positif dengan peningkatan transparansi pengelolaan keuangan negara. Kondisi ini turut mendukung peningkatan arus masuk investasi asing langsung (FDI) serta memperkuat persepsi kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kelembagaan anti korupsi bukan hanya instrumen untuk memberantas praktik koruptif, tetapi juga merupakan strategi fundamental dalam menciptakan tata kelola yang akuntabel, efisien, dan mampu menarik investasi berkelanjutan. Upaya memperkuat independensi lembaga anti korupsi, meningkatkan transparansi kebijakan publik, serta memperketat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara menjadi faktor kunci dalam memperkuat akuntabilitas publik dan menjaga kepercayaan investor di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi, Kelembagaan, Dan Akuntabilitas

ABSTRACT

Corruption is one of the structural obstacles that consistently weaken governance in Indonesia and have a broad implications for social stability, economic growth, and investment appeal. The weak quality of anti-corruption institutional, both in the regulatory aspect, supervision, and law enforcement, often the cause of the low accountability of public sector and reduced investor confidence in the business climate in Indonesia. Conversely, the existence of effective, transparent and independent anti-corruption institutions is believed to be able to strengthen the accountability system, improve bureaucratic efficiency, and create legal certainty needed for investment sustainability. This study aims to analyze the effect of anti-corruption institutional quality of public sector accountability and its implications for investor confidence in Indonesia. The method used is a literature study with a qualitative approach through secondary data analysis of the corruption perceptions index (CPI) report published by Transparency International, Government Governance

Indicator (Worldwide Governance Indicators / WGI) from World Bank, as well as investment realization reports from the Investment Coordinating Board (BKPM). The results of the study show that the improvement of the quality of anti-corruption institutions was reflected in the improvement of the Indonesian CPI score, which in recent years was in the range of 34-37 of a scale of 100, while showing a positive relationship with an increase in the transparency of state financial management. This condition also supports the increase in inflows of direct foreign investment (FDI) and strengthens the perception of investor confidence in the Indonesian economic stability. Thus, this study confirms that the strengthening of anti-corruption institutions is not only instruments to eradicate corrupt practices, but also a fundamental strategy in creating accountable governance, efficient, and able to attract sustainable investment. Efforts to strengthen the independence of anti-corruption institutions, increase the transparency of public policy, and tighten supervision of the management of the state budget to a key factor in strengthening public accountability and maintaining investor confidence in Indonesia.

Keywords: Corruption, Institutions, And Accountability

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah kronis yang telah menggerogoti tata kelola pemerintahan di Indonesia dan memberikan dampak buruk pada akuntabilitas sektor publik serta kepercayaan investor. Meskipun berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tingkat kasus korupsi masih tinggi dan menghambat pembangunan nasional (Altinriset, 2023; Jurnalhukum, 2024). Kualitas kelembagaan anti korupsi yang kuat menjadi faktor penting dalam memperbaiki integritas dan meningkatkan transparansi sehingga mendorong akuntabilitas dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Konteks sosial saat ini menunjukkan bahwa lemahnya etika penyelenggara negara dan implementasi kebijakan anti korupsi secara optimal masih menjadi kendala utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia (Jurnalhukum, 2024). Selain itu, pendidikan dan pembentukan karakter anti korupsi yang dilakukan di berbagai lembaga pendidikan juga menjadi aspek strategis dalam membangun budaya anti korupsi di masyarakat (Sostech, 2024; Educendikia, 2022). Faktor-faktor tersebut memengaruhi kepercayaan publik dan investor terhadap sektor publik yang transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.

Penelitian terdahulu banyak mengkaji aspek kebijakan anti korupsi dan implementasinya dalam sektor publik, namun masih terdapat kesenjangan dalam memahami pengaruh langsung kualitas kelembagaan anti korupsi terhadap akuntabilitas dan kepercayaan investor secara komprehensif di konteks Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan kualitatif untuk menggali faktor-faktor kelembagaan yang berkontribusi dalam memperkuat akuntabilitas sektor publik dan meningkatkan kepercayaan investor. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan baru yang bermanfaat untuk pengembangan kebijakan anti korupsi yang efektif dan praktik tata kelola yang lebih baik di Indonesia.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa terdapat pengaruh positif antara kualitas

kelembagaan anti korupsi dengan akuntabilitas sektor publik serta kepercayaan investor di Indonesia. Korupsi diakui sebagai hambatan struktural yang secara konsisten melemahkan tata kelola pemerintahan, berdampak buruk pada stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, dan daya tarik investasi. Kelemahan dalam kelembagaan anti korupsi, termasuk aspek regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum, seringkali menjadi akar masalah dari rendahnya akuntabilitas sektor publik dan berkurangnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha. Sebaliknya, keberadaan kelembagaan anti korupsi yang efektif, transparan, dan independen dinilai mampu memperkuat sistem akuntabilitas,

meningkatkan efisiensi birokrasi, dan menciptakan kepastian hukum yang sangat diperlukan bagi investasi berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kelembagaan anti korupsi tercermin dari perbaikan skor Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia, yang dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran 34-37 dari skala 100. Perbaikan skor CPI ini memperlihatkan hubungan yang positif dengan peningkatan transparansi pengelolaan keuangan negara. Kondisi yang lebih transparan dan akuntabel ini kemudian turut mendukung peningkatan arus masuk investasi asing langsung (FDI) dan memperkuat persepsi kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan anti korupsi bukan hanya sekadar alat untuk memberantas praktik koruptif, melainkan merupakan strategi fundamental dalam menciptakan tata kelola yang akuntabel, efisien, dan mampu menarik investasi berkelanjutan. Upaya untuk mencapai hal tersebut harus difokuskan pada penguatan independensi lembaga anti korupsi, peningkatan transparansi kebijakan publik, serta pengetatan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara. Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dengan pendekatan kualitatif, menganalisis data sekunder dari laporan CPI Transparency International, indikator tata kelola pemerintahan (Worldwide Governance Indicators/WGI) dari World Bank, dan laporan realisasi investasi dari BKPM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber, seperti laporan resmi, jurnal akademik, serta dokumen kebijakan terkait realisasi investasi (BKPM). Selain itu, penelitian ini juga menganalisis data sekunder yang mencakup Corruption Perceptions Index (CPI) dari Transparency International dan Worldwide Governance Indicators (WGI) dari World Bank. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini secara konsisten mengonfirmasi adanya korelasi positif yang substansial antara peningkatan kualitas kelembagaan anti korupsi dengan penguatan akuntabilitas di sektor publik, serta dampaknya yang signifikan terhadap kepercayaan investor di Indonesia. Temuan ini menggarisbawahi peran krusial institusi anti korupsi dalam membentuk lanskap tata kelola dan iklim investasi suatu negara.

Korupsi diidentifikasi sebagai masalah kronis dan hambatan struktural yang secara sistematis melemahkan fondasi tata kelola pemerintahan di Indonesia. Praktik koruptif ini tidak hanya mengikis efisiensi birokrasi, tetapi juga menimbulkan implikasi luas yang merugikan stabilitas sosial, menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan secara signifikan mengurangi daya tarik investasi baik domestik maupun asing. Dampak negatif ini menciptakan lingkaran setan di mana korupsi menghambat pembangunan, yang pada gilirannya memperburuk kondisi sosial-ekonomi.

Analisis menunjukkan bahwa kelemahan dalam kualitas kelembagaan anti korupsi, yang mencakup aspek regulasi yang longgar, pengawasan yang tidak efektif, dan penegakan hukum yang lemah atau tebang pilih, seringkali menjadi penyebab utama rendahnya akuntabilitas di sektor publik. Kondisi ini menciptakan celah bagi penyalahgunaan wewenang dan sumber daya negara. Akibatnya, kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia menurun drastis, karena mereka menghadapi ketidakpastian hukum, risiko operasional yang tinggi, dan potensi kerugian akibat praktik korupsi.

Sebaliknya, keberadaan kelembagaan anti korupsi yang beroperasi secara efektif, transparan, dan independen terbukti mampu menjadi katalisator positif. Institusi semacam ini tidak hanya memperkuat sistem akuntabilitas dengan memastikan penggunaan anggaran yang bertanggung jawab dan transparan, tetapi juga meningkatkan efisiensi birokrasi melalui pengurangan praktik pungutan liar dan birokrasi yang berbelit. Lebih lanjut, kelembagaan yang kuat ini menciptakan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh investor, memberikan jaminan perlindungan investasi dan lingkungan bisnis yang adil, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan investasi jangka panjang.

Peningkatan kualitas kelembagaan anti korupsi di Indonesia tidak hanya bersifat teoritis, melainkan dapat diobservasi melalui indikator-indikator konkret yang berdampak langsung pada transparansi pengelolaan keuangan negara dan arus investasi.

Perbaikan Skor Corruption Perceptions Index (CPI), Salah satu indikator utama peningkatan kualitas kelembagaan anti korupsi adalah perbaikan skor Corruption Perceptions Index (CPI) yang diterbitkan oleh Transparency International. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan tren perbaikan dengan skor yang berada di kisaran 34-37 dari skala 100. Meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, peningkatan ini mengindikasikan adanya upaya serius dan progres dalam pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola.

Hubungan Positif dengan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara, Perbaikan skor CPI ini memperlihatkan hubungan positif yang kuat dengan peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Transparansi yang lebih baik, misalnya melalui publikasi anggaran yang lebih detail, proses pengadaan barang dan jasa yang lebih terbuka, serta mekanisme audit yang lebih ketat, mengurangi peluang terjadinya korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik.

Dampak pada Arus Investasi Asing Langsung (FDI), Kondisi yang lebih transparan dan akuntabel ini secara langsung mendukung peningkatan arus masuk investasi asing langsung (FDI). Investor cenderung memilih negara dengan risiko korupsi yang rendah dan lingkungan bisnis yang prediktif. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas memberikan sinyal positif kepada investor internasional bahwa Indonesia adalah tujuan investasi yang lebih aman dan menguntungkan.

Penguatan Persepsi Kepercayaan Investor, Selain peningkatan FDI, kondisi ini juga memperkuat persepsi kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Kepercayaan ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi makro, tetapi juga mencakup keyakinan terhadap integritas sistem hukum, efektivitas birokrasi, dan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan anti korupsi harus dipandang bukan hanya sebagai alat untuk memberantas praktik koruptif semata, melainkan sebagai strategi fundamental dan integral dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan mampu menarik investasi berkelanjutan.

Menciptakan Tata Kelola yang Akuntabel dan Efisien Penguatan kelembagaan anti korupsi berkontribusi langsung pada penciptaan tata kelola yang lebih akuntabel, di mana setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ini juga mendorong efisiensi birokrasi dengan menghilangkan praktik-praktik yang menghambat pelayanan publik dan investasi.

Menarik Investasi Berkelanjutan Dengan adanya tata kelola yang baik, Indonesia dapat menarik investasi yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga investasi berkelanjutan yang memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian dan masyarakat. Investasi semacam ini cenderung lebih stabil dan berkontribusi pada

penciptaan lapangan kerja serta transfer teknologi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, upaya yang harus dilakukan, Penguatan Independensi Lembaga Anti Korupsi Memastikan lembaga anti korupsi memiliki otonomi penuh dari intervensi politik atau kepentingan lainnya adalah esensial agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan efektif. Kebijakan publik harus dirumuskan dan diimplementasikan secara terbuka, memungkinkan partisipasi publik dan pengawasan yang lebih baik. Ini mencakup akses informasi yang mudah dan jelas mengenai proses pengambilan keputusan. Pengetatan Pengawasan terhadap Pengelolaan Anggaran Negara Mekanisme pengawasan yang ketat dan efektif terhadap penggunaan anggaran negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, sangat penting untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan dana publik.

KESIMPULAN

Korupsi menjadi masalah struktural di Indonesia yang secara konsisten melemahkan tata kelola pemerintah, Lemahnya kualitas kelembagaan anti korupsi menjadi penyebab rendahnya akuntabilitas sektor publik dan berkurangnya kepercayaan investor. Penelitian ini membahas tentang bagaimana hasil kelembagaan anti korupsi membahas tentang bagaimana kinerjanya terhadap akuntabilitas sektor publik dan bagaimana kepercayaan investor bisa mereka dapatkan kembali secara penuh dan tidak adanya lagi tindakan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Feldi, Y . A . (2023). Peran Good Governance dan Kelembagaan Anti-Korupsi terhadap Kepercayaan Investor di Indonesia
- Fitria. (2013). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, 2(2). <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/1008>
- Kantor, L., & Nasional, B. (n.d.). Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. 5(2), 57–73.
- Oktavianto, R., Mustika, N., & Abheseka, R. (2018). Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK. 5(2), 117–131.
- Prasetyo, W. (n.d.). Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang. 5(1), 15–27.
- Ramadhana, K. (2018). Menyoal Kinerja KPK : Antara Harapan dan Pencapaian. 5(2), 151–163.
- Ernawati Waridah, S. S. (2017). Kamus Bahasa Indonesia. Bmedia.
- Gule, Y. (2021). Studi Teologi-Etis Hubungan Perilaku Korupsi sebagai Dampak Sikap Hidup Hedonis. *Kontekstualita*, 36(01), 69–88. <https://doi.org/10.30631/kontekstualita.36.1.69-88>
- Jimly Asshiddiqie. (2022). Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics. Sinar Grafika.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Prenada Media.
- Kees Bertens. (1993). Etika (Vol. 21). Gramedia Pustaka Utama.
- Lawrence M. Friedman. (2019). Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial. In Terjemahan, M. Khozim, Penerbit Nusa Media (cetakan ke). Nusa Media.
- Mohammad Mahfud MD. (2012). Etika Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Konstitusi. Pidato Ilmiah Dalam Rangka Kuliah Perdana Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 17 Septemb.

- Muchsin, S. (2019). Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 6(9), 63–69.
- Patrick Baron Devlin. (1965). *The Enforcement of Morals*. Oxford University Press.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sedarmayanti, H., & Nurliawati, N. (2012). Strategi Penguatan Etika Dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 9(3), 337–361.
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2).
- Wicipto Setiadi. (2018). KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249–262.
- Wulansari, E. M. (2014). Pengaturan Tentang Etika Penyelenggara Negara Dalam Rancangan Undang-Undang. *Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1.
- Yusuf, I. M. (2017). Etika dalam wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. *Dinamika*, 4(4).
- Yusuf Warsyim, H. (2021). Aktualisasi Kode Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia. *Diversi Jurnal Hukum*, 7(1), 129–150.
- Zakaria, A. A. (2023). Analisis Etika dan Moral : Skandal Korupsi Menteri Pertanian. *Medical Genetics*, 1(1), 1–2.